

LONJAKAN INFLASI, DAMPAK DAN ANTISIPASINYA

Venti Eka Satya^{*)}



Abstrak

Terbitnya Permendag No. 53 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern, Permendag No. 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dan Permendag No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba memberikan penguatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Substansi dari aturan ini perlu dimuat lebih lanjut dalam RUU tentang Perdagangan, agar dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan, termasuk pemberi izin. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini harus jelas. Sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak terjadi distorsi antara aturan di tingkat nasional dan daerah.

A. Pendahuluan

Inflasi akan sangat menentukan daya saing produk suatu negara secara relatif dengan pesaingnya. Inflasi yang tinggi menunjukkan ketidakefisienan proses dan mahal biaya produksi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia pada semester I tahun 2013 menembus angka US\$ 3,31 miliar. Defisit ini naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan nilai defisit sepanjang 2012 yaitu sebesar US\$1,63 miliar.

Defisit ini berdampak besar terhadap angka inflasi Indonesia. BPS melaporkan inflasi pada Juli 2013 berada di angka 3,29 persen.

Menurut BPS, andil inflasi terbesar disumbang oleh bahan bakar minyak, bahan makanan, makanan jadi, transportasi, dan komunikasi. Inflasi 3,29 persen ini tertinggi sejak 2005. Bank Indonesia (BI) meramalkan laju inflasi akan tetap tinggi hingga tahun depan. Deputi Gubernur BI mengatakan dengan tingginya inflasi pada Juli 2013, secara *year on year (yoy)* inflasi masih akan berada di atas 8 persen sampai Juni 2014.

Berdasarkan catatan BPS, inflasi dari bulan Januari-Juni mencapai 6,75 persen, inflasi tahunan *yoy* tercatat 8,61 persen. Kontribusi inflasi Juli menurut jenis pengeluaran dapat dikelompokkan sebagai berikut: Bahan makanan mempunyai andil inflasi 1,36 persen;

^{*)} Peneliti Muda bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: venti.eka@dpr.go.id



transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,5 persen; makanan jadi, minuman, dan rokok 0,28 persen; air listrik dan bahan bakar 0,1 persen, kesehatan 0,02 persen; dan pendidikan rekreasi dan olahraga 0,04 persen.

B. Penyebab Tingginya Angka Inflasi Serta Dampaknya

Inflasi bulan Juli 2013 mencapai angka 3,29 persen, merupakan inflasi bulanan tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Angka ini lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya yaitu dalam kisaran 2,3 persen sampai 2,89 persen. Secara tahunan, laju inflasi telah mencapai 8,61 persen. Perekonomian Indonesia semakin terpukul karena laju inflasi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2013 hanya naik sebesar 5,81 persen *yoj*, lebih lambat dari pencapaian di kuartal I 2013 sebesar 6,03 persen. Perlambatan tersebut disebabkan beragam faktor, baik menyangkut konsumsi domestik maupun investasi.

Inflasi sesungguhnya telah merampas pendapatan warga miskin melalui penurunan kemampuan konsumsi mereka. Penurunan sektor konsumsi domestik disebabkan oleh kebijakan BI yang baru saja merilis kenaikan suku bunga BI sebesar 75 basis poin (bps) dalam dua bulan lalu menjadi 6,5 persen. Dan efeknya, bunga pinjaman menjadi naik. Hal ini berdampak ke sektor investasi akibat naiknya bunga kredit.

Menurut BPS, inflasi Juli merupakan hasil jalinan banyak faktor, yakni, kenaikan harga BBM bersubsidi, Ramadan, dan masa libur sekolah. Ada lima hal besar penyumbang inflasi Juli 2013, yaitu: BBM, tarif angkutan dalam kota, bawang merah, daging ayam, dan ikan segar. Jika dipilah, harga yang diatur pemerintah menyumbang inflasi sebesar 1,41 persen, inflasi inti punya andil 0,59 persen, dan inflasi harga bergejolak menyumbang 1,29 persen. Sepertinya sudah menjadi sebuah kelaziman di Indonesia bahwa setiap ada perayaan akan selalu diikuti oleh kenaikan harga. Pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya, dan semua pihak seakan pasrah terhadap situasi ini.

Di negara-negara maju seperti Amerika, *Thanksgiving*, yang jatuh pada November, ditandai pula dengan kebiasaan mudik. Saat

itu, petani gandum merayakan panen raya sebelum memasuki musim dingin. Sama seperti Lebaran, semua moda transportasi mendadak sibuk. Akan tetapi, inflasi di Amerika tidak melonjak. Hal ini terjadi karena struktur pasar sudah mapan alias mendekati koordinat persaingan sempurna. Produsen tidak memiliki peluang untuk menaikkan harga secara semena-mena dan sepihak. Kemungkinan adanya praktik kartel harga juga dapat dieliminasi oleh Komite Anti-Kartel Harga. Akibatnya, ritual tahunan *Thanksgiving* tidak identik dengan kenaikan harga (barang dan jasa). Ada lonjakan permintaan barang dan jasa, tapi tidak *inflationary*.

Di Indonesia, inflasi selalu melejit saat Ramadan dan Lebaran karena struktur dan mekanisme pasar masih jauh dari pasar persaingan sempurna. Produsen, pengusaha, atau sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan mengendalikan pasokan dan mengatur harga di pasar masih terbuka peluangnya untuk melakukan kartel serta persekongkolan untuk mengatur volume, harga, dan wilayah distribusi. Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum optimal bekerja untuk menutup peluang kartel dan persekongkolan itu. Usaha KPPU selalu kandas, dan pemerintah sering kali memberi toleransi menaikkan harga, terutama pada sektor transportasi. Kenaikan harga tiket pesawat, bus, dan kereta api diizinkan sampai batas tertentu. Namun batas itu sering dilanggar tanpa sanksi tegas.

Kondisi inflasi pada Ramadan dan Lebaran tahun ini diperparah oleh kenaikan harga BBM yang dilakukan pada saat mendekati lebaran dan masalah kenaikan harga bahan pangan. Pengurangan subsidi BBM seharusnya telah dilakukan pemerintah sejak dua tahun yang lalu, karena pada saat itu subsidi sudah mulai menimbulkan dampak yang besar terhadap defisit APBN, akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil sikap membuat masalah ini menjadi berlarut-larut. Meskipun pada akhirnya harga BBM tetap dinaikkan, akan tetapi pada situasi yang tidak tepat, di saat berbagai masalah menerpa perekonomian Indonesia. Seperti kekurangan pasokan bahan pangan, kenaikan harga musiman di bulan Ramadan dan Lebaran serta defisit neraca perdagangan.

Neraca perdagangan luar negeri Indonesia selama semester I 2013 telah menembus angka US\$3,31 miliar. Defisit neraca perdagangan ini merupakan pukulan telak bagi perekonomian Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah telah gagal menjaga keseimbangan pasar ekspor Indonesia. Defisit yang terparah setelah defisit perdagangan adalah defisit pada neraca pembayaran yang dapat dilihat dari defisit neraca modal. Defisit neraca modal terjadi di mana uang yang masuk untuk investasi lebih sedikit dibandingkan uang yang keluar, sehingga dari hasil penjumlahan kedua arus uang yang masuk dan keluar, akan didapat hasil defisit neraca modal. Defisit ganda tersebut berpotensi memukul industri dan memicu deindustrialisasi, mendongkrak inflasi, mengancam nilai tukar rupiah, serta menggerogoti cadangan devisa.

Ekonom Enny Sri Hartati memprediksikan, pada tahun-tahun selanjutnya, nilai defisit neraca perdagangan Indonesia bakal semakin besar. Kondisi tersebut, merupakan buah pahit dari kegagalan pemerintah dalam mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan di sektor perdagangan. Selain meningkatkan ekspor, untuk menjaga neraca perdagangan, pemerintah harus mampu mengurangi nilai impor yang kian tinggi. Pemerintah tidak mengintensifkan produksi dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, malah melakukan impor pangan yang begitu besar, sehingga nilai impor kita menjadi lebih besar dibandingkan dengan ekspor.

Selain untuk menjaga kecukupan pasokan dalam negeri, tujuan impor adalah untuk menjaga kestabilan harga. Akan tetapi terbukti bahwa usaha ini juga tidak membuahkan hasil. Menteri Pertanian menyatakan kekecewaan atas tingginya harga daging sapi menjelang lebaran. Meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah impor daging, akan tetapi tidak juga mampu menahan laju kenaikan harga produk tersebut. Pemerintah menuding hal ini diakibatkan oleh tidak komitnya para pelaku usaha terhadap janji mereka. Padahal sebenarnya hal ini bisa dikendalikan apabila pemerintah bersungguh-sungguh dan tegas dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku di lapangan.

Kenaikan inflasi mau tidak mau akan berdampak pada kenaikan suku bunga

simpanan, karena bank-bank akan berebut dana pihak ketiga. Bunga simpanan yang lebih rendah daripada inflasi akan menyebabkan negative real *interest rate* sehingga nasabah enggan menyimpan dananya di bank. Sebagai konsekuensinya bunga kredit juga akan terdongkrak naik. Akibat dari naiknya bunga kredit ini adalah turunnya nilai investasi, dan ini akan memperlambat laju dan pertumbuhan ekonomi.

C. Kebijakan Antisipatif terhadap Lonjakan Inflasi

Inflasi merupakan penyakit negara berkembang. Pemerintah harus menetapkan penyelesaian masalah inflasi sebagai suatu prioritas. Salah satu jalan keluar untuk mengendalikan inflasi adalah menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menambah ketersediaannya. Pemerintah jangan lagi menaikkan suku bunga acuan, karena kebijakan menaikkan *BI Rate* tidak akan banyak berdampak bagi perekonomian.

Sebetulnya, *BI Rate* itu tidak terlalu memiliki dampak yang berarti karena selama ini kebijakan itu tidak efektif menekan inflasi. Kenaikan *BI Rate* tidak banyak manfaatnya bagi pengusaha, bahkan justru malah membebani *cost of fund* perbankan. BI dapat memahami bahwa kenaikan inflasi akan membuat suku bunga simpanan naik. Namun, BI menyerahkan keputusan kenaikan suku bunga simpanan pada masing-masing bank.

Sedangkan untuk menambah ketersediaan pangan, maka impor menjadi salah satu jalan yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan harga pangan yang berasal dari lokal biasanya lebih mahal ketimbang harga impor. Akan tetapi ketergantungan terhadap impor telah menggerus devisa dan menimbulkan defisit neraca perdagangan yang sangat tinggi. Pemerintah harus mengurangi import produk yang bukan vital seperti barang-barang mewah dan pesawat yang transaksinya memberatkan neraca perdagangan. Mengingat saat ini harga komoditas sawit, batu bara dan CPO yang merupakan andalan ekspor Indonesia sedang mengalami penurunan. Selain itu pemerintah juga harus mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan menyelesaikan masalah Ekonomi Berbiaya Tinggi.

Defisit yang timbul tidak hanya dalam hal perdagangan tetapi juga permodalan. Untuk mengatasi dampak defisit ganda ini, pemerintah harus memetakan industri unggulan yang berdaya saing tinggi, melindungi industri yang tertekan oleh perdagangan bebas, meningkatkan daya saing ekonomi, membenahi iklim investasi, membenahi struktur industri, menyelesaikan masalah perburuhan, serta mengatasi berbagai persoalan klasik penyebab Ekonomi Berbiaya Tinggi.

Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan harga dalam negeri akibat peristiwa-peristiwa musiman seperti perayaan hari besar dan lainnya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, mendorong terciptanya struktur dan mekanisme pasar persaingan sempurna agar tidak ada produsen atau penjual yang bisa mendikte harga secara sepihak.

Kedua, meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah harus tegas menindak pelaku yang menaikkan harga atau tarif di luar ketentuan. Dalam kaitan ini, pemerintah dan DPR juga perlu memberdayakan lembaga KPPU. Bila dipandang perlu, sudah saatnya dilakukan amendemen pasal-pasal tertentu dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk meningkatkan kewibawaan dan *power* KPPU.

Ketiga, merevitalisasi Bulog dengan cara memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tapi juga menangani beberapa komoditas penting lain disertai instrumen stabilisasi yang lengkap, seperti cadangan, harga, pengaturan impor (waktu dan kuota), serta anggaran yang memadai.

Keempat, memperbaiki jalur distribusi barang. Selama ini harga barang mudah melejit tinggi ketika jalur distribusi terganggu. Ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang buruk, sebuah pekerjaan rumah terbesar yang sedang dihadapi pemerintah.

Kelima, membenahi administrasi perdagangan dalam dan luar negeri. Paling penting adalah administrasi pergudangan. Ketika informasi gudang dikuasai, gerak arus barang dari satu titik ke titik lain akan mudah diestimasi, termasuk fluktuasi harga.

D. Penutup

Angka inflasi bulan Juli 2013 telah menembus angka yang sangat fantastis. Inflasi ini terjadi karena berbagai faktor di antaranya: Kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pangan akibat kelangkaan pasokan, kehadiran bulan Ramadan dan Lebaran serta defisit neraca perdagangan. Inflasi ini telah berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan turunya tingkat investasi akibat kenaikan *BI Rate*.

Situasi ini harus segera diatasi untuk menjaga agar roda perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan baik. Kenaikan harga akibat kurangnya pasokan yang selama ini diatasi dengan cara mengimpor harus segera diatasi. Ketergantungan terhadap impor harus segera dikurangi dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Selain itu infrastruktur nasional juga harus diperbaiki untuk menanggulangi masalah ekonomi berbiaya tinggi. Beberapa peraturan perundang-undangan juga perlu dibenahi untuk mendorong penyelesaian permasalahan ini. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan antisipatif terhadap lonjakan inflasi di kemudian hari.

Rujukan:

1. "Agustus, Inflasi Diprediksi Stabil," *Harian Ekonomi Neraca*, 12 Agustus 2013.
2. "Bank Harus Naikkan Bunga," *Republika*, 6 Agustus 2013.
3. "Harga Pangan Tinggi, Daya Beli Masyarakat Melemah," *Kompas*, 14 Agustus 2013.
4. "Lebaran Tanpa Inflasi," *Koran Tempo*, 6 Agustus 2013.
5. "Menjaga Daya Saing," *Harian Ekonomi Neraca*, 12 Agustus 2013.
6. "Neraca Perdagangan Jeblok, Ekonomi Nasional Terpukul," *Harian Ekonomi Neraca*, 2 Agustus 2013.
7. "Data Inflasi Bulanan," <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/#>, diunduh 13 Agustus 2013.
8. "Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia," http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?, diunduh 13 Agustus 2013.
9. "Defisit Neraca Perdagangan Paling Parah," <http://www.neraca.co.id/harian/article/31711/>, diunduh 14 Agustus 2013.